

**PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN UKM SEBELUM DAN SESUDAH
MEMPEROLEH KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI**
(Studi Kasus pada UKM di Tiga Kecamatan di Kabupaten Agam)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

PUTRI NILAM SARI
2009/ 13306

**PENDIDIKAN EKONOMI (KOPERASI)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Perbedaan Kinerja Keuangan UKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus pada UKM di Tiga Kecamatan di Kabupaten Agam).

Nama : Putri Nilam Sari
NIM/BP : 13306/ 2009
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Koperasi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 April 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



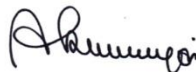
Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si
NIP 19770525 200501 1 005

Pembimbing II



Perengki Susanto, S.E, M.Sc
NIP 19810404 200501 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi



Dra. Armida, S, M.si
NIP 19660206 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Perbedaan Kinerja Keuangan UKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. (Studi Kasus pada UKM di Tiga Kecamatan di Kabupaten Agam).

Nama : Putri Nilam Sari

NIM : 13306/2009



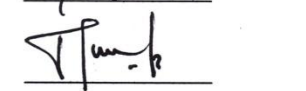

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Keahlian : Koperasi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 26 April 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Perengki Susanto, S.E, M.Sc	2. 
3. Anggota	: Hj. Rosyeni Rasyid, S.E, M.E	3. 
4. Anggota	: Firman, S.E, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN

Nama : Putri Nilam Sari
NIM / Thn. Masuk : 13306/2009
Tempat / Tgl Lahir : Canduang, 08 November 1990
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Koperasi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl Bondo No 10 Air Tawar Barat Padang
No. Hp / Telepon : 085356106367
Judul skripsi : Perbedaan Kinerja Keuangan UKM Sebelum dan Sesudah
Memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri (studi kasus pada UKM di
tiga kecamatan di kabupaten Agam).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis /skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis /skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah tertulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis /skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Agam, 10 November 2013
Pernyataan
77EE2ABP283601888
6000 DJP
Putri Nilam Sari
NIM.13306

ABSTRAK

Putri Nilam Sari 13306/2009 Perbedaan Kinerja Keuangan UKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus pada UKM di Tiga Kecamatan di Kabupaten Agam).

Pembimbing 1 : Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si

Pembimbing II : Perengki Susanto, S.E, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian Deskriptif Komparatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 153 UKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Proportionate Random Sampling*. Sampel penelitian ini berjumlah 60 UKM. Data penelitian merupakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *Paired Sample T-Test* dengan program SPSS versi 15.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri diukur dari *NPM* dengan $t_{hitung} -7.168$ $t_{tabel} 1.671$ pada tingkat sig $\alpha = 0.000 < 0.1$, (2) tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri diukur dari *ROA* dengan $t_{hitung} 1.441$ $t_{tabel} 1.671$ pada tingkat sig $\alpha = 0.155 > 0.1$, (3) terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri diukur dari *ROE* dengan $t_{hitung} -4.414$ $t_{tabel} 1.671$ pada tingkat sig $\alpha = 0.000 < 0.1$. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, disarankan kepada pemerintah meningkatkan jumlah dana PNPM Mandiri yang bisa direalisasikan, UPK PNPM mandiri disarankan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada UKM penerima kredit PNPM Mandiri, KSM PNPM Mandiri disarankan mengembangkan usaha baik secara produksi dan target pasar produksi keluar daerah produksi, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja usaha secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbedaan Kinerja Keuangan UKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus pada UKM di Tiga Kecamatan di Kabupaten Agam)”. Salam dan shalawat kepada Rasullullah SAW sebagai figur yang senantiasa memberikan inspirasi tentang berbagai hal dalam menyikapi kehidupan menuju ridha-Nya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik dan selaku dosen pembimbing satu skripsi.
2. Bapak Perengki Susanto, S.E. M.Sc selaku dosen pembimbing dua skripsi..
3. Ibu Hj. Rosyeni Rasyid, S.E, M.E selaku penguji satu skripsi.
4. Bapak Firman, S.E, M.Sc selaku penguji dua skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Dra. Armida, S, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
7. Bapak Rino, S.Pd, M.Pd, M.M selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

8. Bapak Supan Weri Mandar, S.Pd selaku staf administrasi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak dan Ibu Staf Pengajar beserta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang.
11. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Agam, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) PNPM Mandiri Kecamatan Canduang, Kecamatan Baso, dan Kecamatan Ampek Angkek.
12. Kedua orang tua (Syafrial dan Desmi Burhan), abang (Boby Novika S.Ip) dan adik-adik (Muhammad Syukri dan Radhiatul Afriani).
13. Rekan-rekan program studi pendidikan ekonomi angkatan 2009, khususnya pendidikan ekonomi koperasi 2009.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat menjadi hal yang bermanfaat dan Allah SWT menjadikannya amalan yang baik di sisi-Nya.Amin.

Padang, 26 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Pembatasan Masalah	17
D. Perumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
 BAB II KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	20
1. Kinerja	20
1) Pengertian Kinerja	20
2) Pengertian Kinerja Keuangan	23
3) Penilaian Kinerja	24
4) Penilaian Kinerja Keuangan UKM	25

5) Analisis Kinerja Keuangan UKM Melalui Rasio Profitabilitas	26
2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan UKM.....	33
3. Kredit PNPM Mandiri sebagai Sumber Modal Kerja UKM	35
1) Konsep Kredit PNPM Mandiri	35
2) Jenis Kredit PNPM Mandiri	42
3) Manfaat Kredit PNPM Mandiri	42
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Konseptual	44
D. Hipotesis	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Variabel Penelitian	49
E. Jenis dan Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Definisi Operasional	50
H. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum kecamatan Canduang, Baso, dan Ampek Angkek	52
2. Persyaratan UKM Penerima Kredit PNPM Mandiri.....	54

3. Karakteristik UKM	55
4. Deskriptif Variabel Penelitian.....	56
5. Hasil Analisis Data	62
1) Analisis Deskriptif	62
2) Uji Hipotesis Komparatif	65
B. Pembahasan	71
1. Kredit PNPM Mandiri Terhadap PNPM Mandiri	71
1) <i>Net Profit Margin</i> (NPM)	71
2) <i>Return On Asset</i> (ROA)	73
3) <i>Return On Equity</i> (ROE)	75
 BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan.....	81
B Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Jumlah UKM sektor industri, perdagangan dan jasa kabupaten Agam tahun 2012	9
1.2 Realisasi kredit PNPM Mandiri tahun 2012	10
1.3 populasi dan sampel	49
4.1 karakteristik UKM	55
4.3 Rata-rata profitabilitas UKM Canduang	58
4.4 Rata-rata profitabilitas UKM Baso	59
4.5 Rata-rata profitabilitas UKM Ampek Angkek	60
4.6 Rata-rata profitabilitas UKM gabungan	61
4.7 Paired sample statistic UKM Canduang	62
4.8 Paired sample statistic UKM Baso	63
4.9 Paired sample statistic UKM Ampek Angkek	64
4.10 Paired sample statistic UKM Gabungan	65
4.11 Paired sample test UKM Canduang	66
4.12 Paired sample test UKM Baso	67
4.12 Paired sample test UKM Ampek Angkek	69
4.12 Paired sample test UKM Gabungan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Kerangka Konseptual	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Tabel 1 Nama Penerima Kredit PNPM Mandiri Tahun 2012	84
Tabel 2 Laporan Keuangan UKM Penerima Kredit PNPM Mandiri	87
Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas Gabungan Tiga Kecamatan	90
Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas Masing-Masing Kecamatan	93
Tabel 5 Tabel Bantu T <i>Statistic</i>	96
Surat Observasi dan Penelitian	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi berdasarkan kerakyatan serta menjadi sokoguru perekonomian nasional merupakan cita-cita bangsa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menerangkan prinsip bangun perekonomian nasional disusun oleh kekuatan rakyat. Hal ini merupakan wujud kesadaran pemerintah bahwa maju mundurnya perekonomian nasional tidak berada pada pihak penguasa namun peran dan partisipasi aktif masyarakat menentukan gerak langkah perekonomian nasional (Saparuddin, 2011:161).

Salah satu wujud usaha ekonomi berbasis kerakyatan adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai ragam definisi UKM yang banyak dikemukakan oleh berbagai pihak baik dilihat dari ketentuan jumlah modal dan pendapatan tahunan serta dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, namun dalam penelitian ini penulis akan meneliti UKM dari kesamaan karakteristik yang dimiliki yaitu: UKM tidak memiliki pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi, dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola, memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga, rendahnya akses terhadap lembaga kredit formal, belum berstatus badan hukum, dan bergerak pada industri rumah tangga (Suhardjono, 2006:15).

Faktor yang mempengaruhi perkembangan UKM terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti: ketersediaan modal usaha yang memadai (*capital*), sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian, jaringan usaha dan kemampuan menguasai pasar. Faktor eksternal seperti: baiknya iklim usaha, sarana dan prasarana cukup tersedia, dan implikasi otonomi daerah maupun pemberlakuan perdagangan bebas yang memihak kepada para pelaku ekonomi UKM (Hafsah, 2004:41).

Sektor UKM memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh UKM. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai (Anoraga, 2004:44).

UKM merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama perekonomian nasional dan UKM mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian maupun dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terbukti pada masa Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997, UKM mampu bertahan dan sebagai katup pengaman perekonomian nasional.

Kemampuan UKM bertahan dari krisis ekonomi antara lain didukung oleh kondisi inputnya, dimana UKM dapat dikatakan tidak bergantung pada bahan baku impor dan dana pinjaman dalam bentuk mata uang asing, sehingga biaya produksinya tidak terpengaruh oleh depresiasi

nilai rupiah dan dampak negatif yang dirasakan UKM menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan usaha yang tergantung pada bahan baku impor dan dana pinjaman asing. Selain itu UKM juga memiliki potensi pasar yang besar karena harga produk UKM yang relatif lebih rendah sehingga dapat terjangkau oleh berbagai kalangan.

Berry dalam Hapsari (2009:28) mengemukakan pentingnya keberadaan UKM karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja produktif, sebagai bagian dari dinamika pembangunan UKM sering mencapai produktivitas melalui modal dan perubahan teknologi, sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan peningkatan pendapatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional juga tidak perlu diragukan lagi. Tahun 2005 sampai tahun 2012 Kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 56%, jumlah UKM mencapai 99% dari pelaku usaha disamping usaha besar, dan menyerap tenaga kerja lebih dari 95%.

Syahroza dalam Hapsari (2009:28) mengemukakan UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus melakukan upaya pengembangan UKM

karena perkembangan usaha ke arah yang lebih baik merupakan hasil akhir yang harus dicapai oleh seluruh sektor ekonomi yang dijalankan tidak terkecuali pada UKM.

Secara kuantitas jumlah unit UKM yang tercatat BPS dan Kementerian Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,5% tiap tahunnya, namun peningkatan jumlah UKM ini belum diiringi dengan peningkatan kualitas UKM karena faktor yang mempengaruhi perkembangan UKM yang dijelaskan sebelumnya belum maksimal, terutama akses untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu kemauan masyarakat untuk membuka peluang usaha dalam kegiatan ekonomi UKM sering mengalami kegagalan untuk tumbuh dan berkembang.

Pengorganisasian ekonomi dan sumberdaya nasional dengan prinsip demokrasi ekonomi telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu negara harus menjamin kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, yang dalam hal ini UUD menjamin adanya pemberian akses modal bagi pelaku ekonomi non usaha besar.

Makna ekonomi dalam pasal tersebut adalah memberi akses sumber daya ekonomi bukan hanya pada pemilik usaha yang menjalankan usanya dengan menggunakan modal dalam jumlah yang besar, akan tetapi meningkatkan akses kemudahan dalam mencukupi kebutuhan modal bagi usaha yang bergerak dengan keterbatasan modal sendiri terutama.

Harapan yang dapat diambil dengan adanya bantuan tambahan faktor produksi berupa modal kerja baik untuk memulai, melanjutkan, atau untuk mengembangkan usaha adalah munculnya kekuatan ekonomi domestik yang dapat menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional yang adil yaitunya UKM.

Menekankan terhadap modal kerja, modal kerja merupakan salah satu faktor produksi penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi yang paling penting untuk pengadaan faktor produksi lainnya seperti: tanah, bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi.

Setiap usaha memerlukan sejumlah modal untuk memulai dan menjalankan usahanya. Baik modal sendiri yang digunakan untuk belanja aktiva tetap maupun modal yang berasal dari luar yang digunakan untuk belanja aktiva lancar, sehingga setiap unit usaha perlu melakukan pengelolaan modal dengan baik, atau dengan kata lain perlu adanya manajemen permodalan yang baik. Meskipun besar kecilnya modal kerja bukan merupakan ukuran utama dalam menilai tingkat kontinuitas usaha, namun masalah pengelolaan modal kerja merupakan hal yang paling dominan dalam suatu usaha.

Pada dasarnya pemerintah bekerjasama dengan lembaga keuangan perbankan untuk membantu pelaku UKM memperoleh modal usaha. Namun, untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada lembaga perbankan, para pelaku UKM dituntut menyajikan proposal usaha

yang layak usaha dan menguntungkan (*feasible*), UKM harus dapat memenuhi ketentuan (*bankable*) seperti pemenuhan jaminan pinjaman (*collateral*). Akibat dari perilaku bank yang bersifat hati-hati (*prudent*) semakin mempersulit UKM untuk mengakses modal.

Belajar dari krisis yang menimpa perekonomian nasional dan berbagai akibat yang hingga kini masih dirasakan menimbulkan kesadaran bahwa UKM memiliki peranan yang sangat besar dalam memperkokoh struktur perekonomian dan upaya pemulihan ekonomi nasional, selain itu juga berkaitan dengan kehidupan sebagian besar masyarakat, dimana UKM merupakan unit ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Melihat penting dan strategisnya peran UKM dalam perekonomian nasional, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat mengembangkan UKM di Indonesia, terutama upaya pada penyediaan modal kerja, agar sektor ini mampu berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar dilihat dari keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang akan diberikan UKM terhadap perekonomian nasional dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu semakin berkembangnya kegiatan perekonomian sektor UKM maka sangat dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan modal usaha untuk membiayai kegiatan usaha yang dijalankan karena modal merupakan salah satu faktor produksi utama selain sumber daya tenaga kerja, bahan baku, teknologi dan manajemen.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengindikasikan adanya keberpihakan untuk mempercepat proses pemberdayaan UKM. Salah satu strategi pemerintah mengembangkan UKM melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri kemudian diintegrasikan kedalam konsep terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden pada tanggal 1 Mei 2007 ini bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terjadinya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas usaha, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

PNPM mandiri adalah program nasional yang menjadi kerangka dasar dan acuan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas usaha adalah dengan memberi bantuan berupa kredit modal usaha yang akan digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Penyaluran kredit modal usaha ini mensyaratkan masyarakat membentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya masing-masing telah memiliki usaha perorangan dan termasuk kategori UKM.

Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten yaitu: kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat.

Jumlah anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun 2012 untuk Sumatera Barat sebesar Rp. 143.708 Miliar (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan miliar rupiah). Dana ini direalisasikan untuk 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, salah satunya kabupaten Agam.

Kabupaten Agam memperoleh dana PNPM Mandiri ini sebesar Rp. 12.018 Miliar (dua belas ribu delapan belas miliar rupiah) kemudian direalisasikan kesejumlah UKM yang tersebar di 16 kecamatan. Persentase penyerapan anggaran BLM PNPM Mandiri kabupaten Agam sebesar 97%, artinya dari keseluruhan dana yang dikucurkan ke kabupaten Agam hampir 100% dana tersebut telah direalisasikan kepada KSM PNPM Mandiri kabupaten Agam. (Raza, 2012).

Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dan mempunyai dua sektor unggulan UKM. Pertama, UKM bergerak disektor industri dan kedua UKM bergerak disektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kabupaten Agam mayoritas bergerak diskala usaha mikro kecil dan menengah, namun untuk skala usaha besar belum merata karena beberapa faktor penghambat seperti: perizinan pendirian usaha dalam skala besar

cukup sulit, memerlukan analisis usaha lebih lanjut dan keterbatasan dalam faktor-faktor produksi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah UKM sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa kabupaten Agam tahun 2012.

No.	Kecamatan	Bidang usaha							
		Industri				Perdagangan dan jasa			
		Ke cil	Men engah	Be sar	Jum lah	Ke cil	Men engah	Be sar	Jum lah
1.	Tanjung Mutiara	35	1	1	37	46	2	-	48
2.	Lubuk Basung	73	2	2	77	171	16	-	187
3.	Ampek Nagari	21	-	-	21	35	-	-	35
4.	Tanjung Raya	15	-	-	15	35	-	-	35
5.	Matur	48	-	-	48	114	-	-	114
6.	IVKoto	70	3	-	73	46	9	-	55
7.	Banuhampu	56	2	-	58	229	12	-	241
8.	Sungai Pua	85	1	-	89	67	5	-	72
9.	IV Angkek	112	4	-	116	69	4	-	73
10.	Canduang	71	-	-	71	63	-	-	63
11.	Baso	68	-	-	68	193	3	-	196
12.	Tilatang Kamang	75	2	-	77	31	2	-	33
13.	Kamang Magek	96	4	-	100	29	5	-	34
14.	Palembayan	66	-	2	68	40	-	-	40
15.	Palupuh	51	3	-	54	52	4	-	56
16.	Malalak	4	-	-	4	54	-	-	54
JUMLAH		946	22	5	973	1274	62	-	1336

Sumber: database dinas koperindag kabupaten Agam tahun 2012

Sektor usaha bidang industri terdiri dari: konveksi tekstil, sulaman/ bordiran, kerajinan emas/ perak, industri makanan/ minuman, industri kayu/ perabot, pandai besi/ tembaga/ kuningan, industri gula aren/ tebu,

gilingan padi, kerajinan anyaman, dan industri batu bata. Sektor usaha bidang perdagangan dan jasa terdiri dari: dagang makanan/ minuman, dagang P&D, dagang bahan bangunan, dagang pakaian, dagang hasil bumi, jasa perbengkelan, dan jasa jahit/ tukang cukur/ tambal ban/ rental.

16 kecamatan di kabupaten Agam dalam penelitian ini memfokuskan lagi pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Canduang, kecamatan Baso, dan kecamatan Ampek Angkek. Pemilihan tiga kecamatan tersebut didasarkan kepada persebaran demografi atau persebaran kependudukan di tiga kecamatan tersebut mayoritas melakukan aktivitas ekonomi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa dalam skala UKM. Tahun 2012 jumlah dana dari kredit PNPM Mandiri yang direalisasikan ke masing-masing kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2: Realisasi kredit PNPM Mandiri tahun 2012

No.	Kecamatan	Realisasi Kredit PNPM Mandiri	Jumlah UKM penerima	% yang telah direalisasikan
1.	Canduang	Rp. 159.997.000	48 unit	97%
2.	Baso	Rp. 168.420.700	44 unit	97%
3.	Ampek Angkek	Rp. 194.735.000	61 unit	97%
Total		Rp. 523.152.700	153 unit	

Sumber: Surat Pemberitahuan Camat, 2012.

Namun dalam pelaksanaannya realisasi dana kredit PNPM Mandiri yang diberikan kepada UKM yang sudah mencapai 97% tersebut belum ada tindakan baik dari dinas koperindag, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri masing-masing kecamatan untuk menilai sejauh mana kredit PNPM Mandiri ini mampu meningkatkan kinerja UKM dan

apakah sistem kredit PNPM Mandiri yang dilakukan sudah tepat dalam pemberdayaan UKM sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Memperhitungkan konsekuensi keuangan dan konsekuensi ekonomi dari keputusan manajemen yang mempengaruhi modal, operasional dan pembiayaan sangat penting. Maka pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah sumber daya yang ada telah digunakan secara efisien, apakah profitabilitas bisnis telah memenuhi harapan, dan apakah pembiayaan telah ditentukan secara cermat (Kuncoro, 2005:1).

Perkembangan suatu usaha dipengaruhi oleh konsep strategi manajemen yang diterapkan, kompensasi harta, permodalan usaha yang kuat, proses pengambilan keputusan yang rasional dan kondisi ekonomi. Dalam proses pengambilan keputusan, persoalan yang dihadapi pelaku ekonomi UKM berhubungan dengan keefektifan pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan usaha.

Penilaian usaha sering hanya sebagai aktivitas rutin tanpa adanya penekanan untuk menindak lanjuti hasil pengukuran yang didapatkan. Hasil dari penilaian usaha pada hakikatnya hanya memberikan pandangan bahwa terdapat perbedaan laba usaha yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan tetapi tidak memberikan arahan mengapa perbedaan itu terjadi dan tidak memberikan cara penyelesaian. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut (Wibisono, 2006:5).

Selama ini penilaian usaha hanya terfokus kepada usaha ekonomi produktif yang tergolong usaha besar karena usaha besar memiliki

manajemen usaha yang baik sehingga mudah untuk melakukan penilaian pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Akan tetapi sebaliknya, sangat sedikit perhatian untuk menilai bagaimana pertumbuhan dan perkembangan unit UKM karena manajemen UKM tidak tersusun secara baik.

Globalisasi telah menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Hal ini berpengaruh pada tingkat persaingan yang semakin tinggi. Terutama untuk persaingan dunia usaha tidak lagi hanya persaingan yang diharapkan terjadi pada usaha-usaha dalam skala besar namun usaha-usaha berbasis kerakyatan juga dituntut untuk memiliki daya saing ditengah terjadinya persaingan bebas dunia usaha. Meskipun berbagai kebijakan direncanakan, dijalankan, dan direalisasikan namun kebijakan tersebut tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dirasakan tidak memiliki manfaat terhadap yang menerima kebijakan dan tanpa strategi yang tepat untuk mengembangkan UKM maka tidak mustahil akan banyak UKM di Indonesia yang kalah bersaing (Ali, 2006).

Mengetahui kondusifitas sektor UKM dalam perkembangannya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat, dan setiap sektor kegiatan UKM. Seberapa jauh keberhasilan sistem dalam hal ini adalah kredit PNPM Mandiri membangun pemberdayaan UKM, dapat dilihat dari seberapa besar angka pertumbuhan UKM mampu meningkatkan kualitas UKM itu sendiri dan melihat semua aspek potensi dalam pengembangan UKM dengan tujuan yang dicapai adalah mengetahui kinerja UKM.

Perkembangan UKM dinilai melalui kinerja. Kinerja berpengaruh besar untuk menunjang perkembangan UKM. Jika kinerja UKM baik maka perkembangan UKM dapat dikatakan baik, sebaliknya jika kinerja UKM tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka perlu dilakukan perubahan dalam manajemen UKM tersebut.

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan usaha dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Prinsip manajemen pengelolaan sebuah usaha harus menentukan indikator tertentu untuk mengukur tingkat kinerja usaha dan apakah tujuan usaha telah tercapai.

Program melalui penyaluran kredit modal usaha ini merupakan bentuk pemberian bantuan jangka pendek kepada pemilik UKM anggota KSM. Sebagai bagian dari bantuan yang berbentuk pinjaman, maka penilaian terhadap kinerja pengelolaan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator dalam manajemen keuangan (*financial*) organisasi bisnis.

David dan Supangkat dalam Sudarto (2011:20) mengemukakan istilah kinerja dikaitkan dengan kondisi keuangan usaha yang dijalankan. Menilai kinerja UKM menggunakan indikator dalam manajemen keuangan organisasi bisnis dapat diwakili oleh rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio profitabilitas (*profitability ratio*), dan rasio pertumbuhan (*growth ratio*).

Rasio liquiditas merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk mengetahui apakah suatu usaha mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Suatu usaha yang dijalankan akan dinyatakan liquid apabila mempunyai uang tunai yang cukup atau mempunyai harta yang dapat dijual atau ditukar menjadi bentuk uang tunai dalam waktu relatif cepat untuk membayar hutang jangka pendeknya. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur liquiditas adalah rasio lancar yang diperoleh dengan membandingkan harta lancar dan hutang lancar.

Rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen dalam menjalankan usaha. Rasio profitabilitas terdiri dari *NPM (Net Profit Margin)* yang diperoleh dari pendapatan setelah pajak (pendapatan bersih) dibagi dengan penjualan, *ROA (Return On Asset)* yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan total harta dan *ROE (Return On Equity)* yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan total modal yang ditanamkan.

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomiannya dan sektor usahanya.

Rasio keuangan dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda. Kedua, membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan lain. Analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio

standar. Terdapat dua macam rasio standar yang lazim digunakan. Yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis atau rasio industri (Muslich, 2003:47).

Penilaian kinerja usaha dapat dibandingkan secara internal dan eksternal. Kaji banding secara internal adalah membandingkan kinerja usaha yang dinilai dengan usaha yang memiliki kinerja yang lebih baik di atasnya. Kaji banding secara eksternal adalah membandingkan kinerja usaha yang dinilai dengan pesaing atau kinerja usaha yang sejenis atau sama (Wibisono, 2006:5).

Penilaian kinerja keuangan UKM dari perolehan kredit PNPM Mandiri akan terlihat dari perbandingan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri. Sejauh mana kredit PNPM Mandiri yang disalurkan memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan kinerja keuangan usaha yang dijalankan.

Penilaian kinerja dapat menghasilkan informasi penting yang berguna. Misalnya sebagai umpan balik (*feedback*) bagi implementasi strategi jika terjadi penyimpangan. Untuk menghindari penyimpangan strategi perlu dilakukan perubahan misalnya perubahan rencana, kegiatan dan pengendaliannya (Umar, 2002:11).

Heinrich dalam Maruf (2011:7). Mengemukakan bahwa program pemerintah lebih mengedepankan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pertanggung jawaban serta transparansi pihak yang terlibat dalam kegiatan penyaluran kredit PNPM Mandiri tersebut kemudian membandingkan hasil penilaian dengan target sebelumnya yang diharapkan dapat tercapai.

Adanya bantuan kredit modal usaha dari PNPM Mandiri ini dan realisasi kredit di masing-masing kecamatan sudah mencapai 97% diharapkan UKM penerima kredit mampu dan cepat untuk berkembang secara kualitas dan meningkatnya kinerja UKM yang memperoleh kredit PNPM Mandiri ini. Sejalan dengan realisasinya dana kredit PNPM Mandiri diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembangunan millenium atau lebih dikenal dengan *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas di atas maka penulis merasakan perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan program pemerintah yang dikenal dengan PNPM Mandiri. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mengetahui **Perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (studi kasus pada UKM di tiga kecamatan di kabupaten Agam) yaitu kecamatan Canduang, kecamatan Baso, dan**

kecamatan Ampek Angkek tahun 2012 dengan menggunakan rasio profitabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dana kredit PNPM Mandiri yang diberikan kepada UKM belum ada tindakan untuk menilai efektivitas kredit, sistem kredit PNPM Mandiri yang dilakukan belum diketahui sudah tepat atau belum dalam pemberdayaan UKM, dan belum ada evaluasi terhadap kinerja UKM.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan waktu, kemampuan peneliti, terjangkau wilayah geografis 16 kecamatan di kabupaten Agam, dan melihat gambaran demografi atau persebaran kependudukan tiga kecamatan tersebut mayoritas bergerak disektor UKM sehingga penelitian ini lebih terfokus pada Perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan menggunakan indikator rasio profitabilitas (studi kasus pada UKM di tiga kecamatan di kabupaten Agam) yaitu kecamatan Canduang, kecamatan Baso, dan kecamatan Ampek Angkek tahun 2012.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat Perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan menggunakan indikator rasio profitabilitas?.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan menggunakan indikator rasio profitabilitas.
2. Mengetahui kesiapan dari Unit Pengembangan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merealisasikan kembali dana kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menerima kelanjutan program.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan masukan bagi pemerintah dalam pemberian kredit PNPM Mandiri tahap selanjutnya.
2. Bahan masukan dan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja UKM.

3. Bagi peneliti sebagai bahan menyusun skripsi dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan.
4. Sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sejenis ini.

BAB II

KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Perkembangan suatu usaha, menentukan pilihan, dan memberi suatu keputusan perlu terlebih dahulu untuk mengkaji kinerja usaha tersebut karena kinerja merupakan hasil yang dicapai setelah dilakukan tindakan terhadap usaha tersebut. Diketuinya kinerja usaha yang dijalankan membantu untuk memprediksi masa depan, mengantisipasi kondisi masa depan, dan yang lebih penting sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa dimasa depan.

Kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan bagaimana pendekatan pencapaian tujuan usaha. Mengelola dan menyusun strategi pengembangan usaha melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang (Ali, 2006).

Kinerja merupakan suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan usaha melalui pengembangan performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu usaha. Pada implementasinya, kinerja tidak hanya berorientasi pada salah satu

aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam mendukung jalannya suatu usaha. Kinerja merupakan suatu hasil prestasi kerja optimal yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun badan usaha. Hasil kerja ini akan diketahui pada akhir pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penilaian kinerja sesuai dengan masing-masing bidangnya. (Direktorat Jenderal Anggaran, 2008).

Kinerja (*performance*) adalah tentang bagaimana mengelola usaha untuk mencapai tujuan usaha. Keberlangsungan hidup suatu usaha ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai tujuan usaha. Dengan demikian kinerja merupakan kebutuhan setiap usaha yang berorientasi kepada pengelolaan proses pelaksanaan kerja dan hasil atau prestasi kerja (Wibowo, 2013:1).

Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2013:2) mengemukakan pengertian kinerja sering diartikan sebagai hasil kerja, atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis usaha, kepuasan, dan memberikan kontribusi ekonomi.

Kinerja diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam menjalankan usaha dengan mengarahkan semua sumber daya yang ada seperti: manusia, modal, teknologi dan mekanisme kerja yang ditempuh. Kinerja adalah implementasi dari rencana mengenai siapa yang akan melaksanakan usaha, berapa modal usaha, dan bagaimana usaha bisa dijalankan (Wibowo, 2013:3-4).

Kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental. Hubungan kinerja dengan UKM adalah membantu UKM dalam mencapai target usaha yaitu UKM dapat berkembang dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) ditengah persaingan usaha. UKM harus bisa memastikan bahwa usaha yang mereka jalankan sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. UKM yang bergerak diberbagai bidang usaha ditengah masyarakat dipastikan memiliki strategi dalam meningkatkan keuntungan usaha, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik ekonomi daerah maupun ekonomi nasional secara menyeluruh.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil usaha serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap kegiatan ekonomi apapun jenis dan bentuk usaha yang dijalankan. Karena kinerja merupakan cerminan kemampuan dari perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya, selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi pelaku ekonomi dalam mencapai sasaran.

Dari beberapa pengertian kinerja di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu usaha yang dilaksanakan, dimana usaha tersebut diberikan perlakuan yang sesuai, mempunyai tolak ukur, dan menjadi penentu dalam terwujudnya visi dan misi suatu usaha. Dengan teridentifikasinya kinerja UKM maka dapat membantu pelaku ekonomi sektor UKM dan pihak lain dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki strategi dalam pengembangan UKM kedepannya dan memberikan kontribusi ekonomi terhadap pelaku UKM itu sendiri.

2) Pengertian Kinerja Keuangan

Mulyadi dalam Sucipto (2003:1) mengemukakan kinerja keuangan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu usaha, perlu melibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Kinerja keuangan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan usaha. Kinerja keuangan merupakan kinerja yang diperoleh dari kinerja usaha dengan menggunakan hutang.

3) Penilaian Kinerja

Penilaian merupakan proses, cara menilai, dan sistem pengukuran (*measurement*) sedangkan kinerja merupakan pelaksanaan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses, sistem pengukuran, dan evaluasi mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu usaha yang bisa dilihat dari sistem kebijakan dalam mengembangkan usaha atau kegiatan (KBBI,1995:213).

Jungberg dalam Wibisono (2006:5) mengemukakan sistem pengukuran kinerja merupakan sebuah tatanan pengukuran berdasarkan aturan dan prosedur tertentu untuk mencakup, mengkompilasi, mempresentasikan, dan mengkomunikasikan data dalam sebuah kombinasi yang mencerminkan kunci kinerja dan karakteristik dari proses yang cukup efektif memungkinkan analisis intelektual sebagai panduan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Hrenbiniak dan Joyce dalam Sudarto (2011:17) mengemukakan pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam proses evaluasi dan pengendalian perusahaan. Suatu usaha yang tidak dilakukan penilaian kinerja maka usaha tersebut akan sulit menentukan langkah kedepannya terutama dalam menetapkan keputusan dalam menjalankan usaha.

Suatu kinerja yang tidak mempunyai nilai akan cenderung menyimpang keluar dari tujuan yang diharapkan dan akibatnya kinerja menjadi tidak efektif dan efisien. Penilaian kinerja mutlak diperlukan guna memastikan dan menyesuaikan dengan tujuan dan target yang diharapkan.

Penilaian kinerja merupakan perbandingan hasil kinerja nyata dengan hasil yang diharapkan akan tercapai. Untuk mengetahui apakah suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui kinerja usaha tersebut.

4) Penilaian Kinerja Keuangan UKM

Brigham dan Houston dalam Maruf (2011:17) mengemukakan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdapat empat pusat pertanggung jawaban yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: pendapatan, biaya, laba dan investasi. Dalam kaitan dengan laba, maka penilaian kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

Penilaian kinerja UKM. merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas UKM. Hasil pengukuran tersebut kemudian dilakukan umpan balik yang akan memberikan prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dalam perusahaan yang memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian selanjutnya. Penilaian kinerja merupakan salah satu cara untuk mengukur arah dan kecepatan perubahan suatu kegiatan yang dijalankan. Pengukuran kinerja sangat berpengaruh nantinya dalam proses evaluasi usaha.

Pengukuran kinerja UKM biasanya berorientasi pada bidang keuangan dan kemampuan untuk mendapatkan laba dan suatu usaha. Usaha bisa dikatakan mempunyai kinerja baik jika dalam laporan keuangannya mendapat keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini kinerja keuangan UKM dapat dinilai melalui profitabilitas.

5) Analisis Kinerja Keuangan UKM Melalui Rasio Profitabilitas

James C Van Horne dalam Kasmir (2011:104) mengemukakan rasio merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Dari hasil rasio ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan Kasmir (2011:196).

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Brigham dan Houston dalam Rahmatika (2011:5) mengemukakan rasio profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan. Selain itu rasio profitabilitas juga akan menunjukkan kombinasi efek dari liquiditas, manajemen harta (*aktiva*) dan utang pada hasil operasi.

Rasio profitabilitas atau rasio efisiensi merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Mungkin juga efisiensi ini dikaitkan juga dengan penjualan yang berhasil diciptakan (Husnan,1992:563). Dalam hal ini dikaitkan dengan rasio profitabilitas UKM.

Umumnya masalah profitabilitas lebih penting dari pada masalah profit, karena profit yang besar belum merupakan ukuran bahwa suatu usaha yang dijalankan telah berjalan dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui jika profit dibandingkan dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan profit tersebut. Dengan demikian suatu usaha hendaknya tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha memperbesar profit tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi profitabilitasnya, karena profitabilitas yang tinggi merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi pula (Leunupun, 2003:133-149).

Brigham dalam Rahmatika (2011:5) mengemukakan profitabilitas bagi usaha yang dijalankan akan digunakan sebagai alat ukur penilaian dan evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha. Profitabilitas suatu badan usaha merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu usaha, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan modal.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan (*profit*) dalam suatu periode tertentu pada tingkat penjualan (*sales*), harta (*asset*), dan modal (*equity*) (Husnan,1997:544).

Penilaian rasio profitabilitas sangat diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa yang akan datang, sehingga dapat memprediksi kapasitas usaha dalam menghasilkan kas serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Profitabilitas suatu UKM akan mempengaruhi kebijakan pihak lain dalam memberikan kebijakan yang akan mendukung perkembangan UKM. Kemampuan UKM untuk menghasilkan laba akan dapat menarik berbagai penyedia dana baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan batuan dalam bentuk modal kerja dan sebaliknya.

Rasio profitabilitas juga memiliki arti penting dalam UKM mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah UKM mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap UKM akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Rasio profitabilitas menunjukan seberapa efisien pengelolaan UKM. Rasio ini memberikan informasi tentang laba atau hasil akhir (*bottom line*) usaha. Dengan kata lain rasio ini menjelaskan seberapa berhasilkah perusahaan dalam hal ini UKM menjalankan bisnisnya.

UKM mempunyai keuntungan (*margin*) dari pendapatan yang cukup tinggi namun akan dibatasi oleh keterbatasan modal. Salah satu upaya dalam mengembangkan UKM seperti studi yang dikemukakan

oleh Gunari dalam Rahmatika (2011:7) bahwa UKM yang memperoleh dukungan keuangan (*financial*) dari berbagai sumber akan dapat melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan bidang atau sektor usaha. Dukungan berupa modal usaha ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan UKM itu sendiri.

Tujuan suatu kegiatan ekonomi yang berjalan dalam bentuk usaha adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha, melakukan pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas. Ketiga tujuan ekonomis tersebut merupakan pedoman arah strategis semua organisasi bisnis. Perusahaan atau usaha yang tidak mampu bertahan hidup tidak akan mampu memberi harapan kepada pihak yang berkepentingan.

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Rasio sendiri menurut Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012:44) merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Sawir dalam Fahmi (2012:44) juga menambahkan perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.

Secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban selanjutnya kemudian dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Penggunaan kata rasio ini sangat

fleksibilitas penempatannya, sangat dipengaruhi oleh apa dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu disesuaikan dengan wilayah keilmuannya.

Penilaian profitabilitas (*profitability assessment*) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja adalah kemampuan dalam memperoleh laba dibandingkan terhadap pendapatan. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan cara *operating margin assessment* (Sudarto, 2011:20).

Operating Margin Assessment diperlukan oleh pemilik usaha untuk melihat kemampuan perolehan laba terhadap investasi atau terhadap penambahan modal yang telah dilakukan, biasanya dilihat dari *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*.

Efektifitas kinerja keuangan UKM dalam memanfaatkan penyelenggaraan kredit PNPM Mandiri oleh KSM perhitungannya dapat diwakili oleh rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas. Ada tiga rasio yang sering digunakan dalam mengukur rasi profitabilitas yaitu: *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equiry (ROE)*. Rasio Profitabilitas akan mengukur berapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Suhardjono,2005:415-417).

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba dengan penjualan. *NPM* menggambarkan tentang seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan atas penjualan selama periode tertentu,

dalam hal ini diberlakukan kepada UKM. Semakin besar *NPM* semakin baik karena dianggap usaha tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh laba yang cukup tinggi. Contoh, apabila diketahui *NPM* sebesar 15% maka berarti dari setiap Rp. 1 penjualan yang dilakukan perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 15% atau Rp. 0,15. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{penjualan}} \dots\dots\dots (1)$$

Return on assets (ROA) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat harta yang ditanamkan atau bisa dimanfaatkan dapat menghasilkan laba sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aktiva}} \dots\dots\dots (2)$$

Return on equity (ROE) mengetahui tingkat pengembalian modal dengan cara membagi laba bersih dengan modal yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{modal}} \dots\dots\dots (3)$$

Sumber: Suhardjono (2005:415-417).

Penulis menyimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan UKM dengan menggunakan rasio profitabilitas akan sangat berguna karena merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menilai sejauh mana perkembangan suatu usaha, hasil penilaian ini akan membantu dalam mengambil keputusan serta memberikan gambaran layak atau tidak layak UKM yang dinilai kinerjanya tersebut untuk

kembali menerima bantuan kredit PNPM Mandiri dalam mengembangkan usaha.

2. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan UKM

Hansen dan Mowen dalam (Sudarto,2011:17) mengemukakan pengukuran kinerja bertujuan untuk dapat mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas yang bernilai tambah. Tujuan pokok penilaian kinerja keuangan UKM itu sendiri adalah untuk membantu dalam menetapkan standar dan target, sarana untuk kemajuan, memotivasi, mengkomunikasikan strategi dan organisasi, dan mempengaruhi perubahan perilaku.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan UKM adalah:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. untuk mengukur produktivitas seluruh dari seluruh dana yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penilaian kinerja keuangan UKM adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen usaha, terutama bagi UKM.

- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan tingkat kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

Menurut Fahmi (2012:47) mengungkapkan manfaat dalam penggunaan rasio keuangan adalah:

- a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- b. Analisis keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
- c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
- d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk mempekirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

Berdasarkan manfaat yang dikemukakan oleh Fahmi diatas apabila dikaitkan dengan manfaat pengukuran kinerja keuangan UKM dalam hal ini adalah untuk menilai kinerja keuangan UKM sebagai upaya dalam membuat perencanaan dan keputusan usaha kemudian menilai bagaimana kondisi keuangan UKM dalam kemampuan memaksimalkan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman.

Menilai kinerja usaha dari perspektif rasio keuangan memiliki keunggulan seperti lebih mudah dalam memperbandingkan usaha

dengan usaha lainnya atau melihat perkembangan usaha secara periodik (*time series*).

Analisis rasio keuangan digunakan dalam menilai usaha akan memberikan gambaran tentang keadaan usaha dan dijadikan sebagai alat prediksi bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Karena rasio keuangan juga memungkinkan memperkirakan bagaimana memperoleh kebutuhan dana, serta seberapa besar dana sanggup diperoleh.

3. Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai Sumber Modal UKM

1) Konsep Kredit PNPM Mandiri

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan usaha, karena modal kerja dapat dikatakan sebagai dana yang dimiliki perusahaan untuk membiayai usaha. Jika modal kerja dikelola dengan sebaik mungkin maka usaha akan mampu meraih laba secara cepat.

Modal kerja merupakan keseluruhan harta lancar yang dimiliki, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi usaha sehari-hari. Selanjutnya modal kerja merupakan dana yang diperlukan untuk operasi sehari-hari tapi tidak untuk membeli aktiva tetap atau aktiva jangka panjang (Husnan, 1992:544).

Dari teori yang dikemukakan mengungkapkan bahwa modal kerja merupakan faktor produksi yang digunakan untuk membiayai

kegiatan dalam membelanjai usaha. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional usaha diharapkan akan kembali dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan atau hasil produksi. Kemudian dikeluarkan kembali guna membiayai operasional usaha selanjutnya.

MC Commic dalam Munizu (2010:33-40) mengemukakan peran sektor UKM diharapkan akan tetap berlanjut dengan cara pemerintah dan pihak terkait memiliki acuan yang jelas tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja usaha tersebut. Kinerja usaha mikro dan kecil dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), aspek keuangan, aspek teknik produksi, aspek pemasaran, dan faktor eksternal seperti: kebijakan pemerintah, aspek social budaya dan ekonomi, serta perana lembaga terkait seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Fokus kepada kebijakan pemerintah dana spek keuangan sebagai faktor yang meningkatkan kinerja usaha, beberapa tahun terakhir ini pelaku usaha lingkungan swasta atau UKM sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah dalam mendukung perkembangan usaha mereka, terutama dalam membantu pelaku usaha untuk memperoleh modal. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk UKM salah satunya penyediaan modal yang berbasis

kerakyatan. Pemerintah menyalurkan modal usaha dalam bentuk dana bergulir kredit PNPM Mandiri.

Pemahaman kredit sangat luas namun menuju pada satu makna bahwa kredit merupakan kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa dana yang disalurkan dapat diyakinkan untuk dikembalikan lagi sedangkan bagi sipenerima kredit memiliki kewajiban menggunakan untuk kegiatan yang memberikan keuntungan.

Djumhana dalam Untung (2004:15) mengemukakan awal perkembangannya kredit berfungsi untuk mengarahkan debitur dan kreditur. Pihak yang mendapatkan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya sedangkan bagi debitur akan mengharapkan adanya rentabilitas atau keuntungan berdasarkan perhitungan modal usaha yang diberikan.

Kredit bagi berbagai pihak merupakan sumber penghasilan yang sangat besar yang berasal dari bunga provisi kredit. Dengan adanya kredit diharapkan akan diperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut sangat berguna untuk menambah modal usaha yang akan dilakukan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Kredit yang diberikan pemerintah maupun swasta haruslah bermanfaat, menguntungkan, artinya selain menjamin pelunasan atas penarikan dana, juga harus menghasilkan keuntungan bagi pihak yang memperolehnya. Selain itu, juga untuk pertumbuhan ekonomi negara,

artinya bahwa pemberian kredit tersebut harus menunjang perekonomian negara sehingga dengan demikian tidak dibenarkan adanya pemberian kredit kepada masyarakat yang dapat merugikan. Pemberian kredit tersebut juga diharapkan menyebabkan usaha penerima kredit dapat lebih ditingkatkan karena pelunasan kredit yang telah diperoleh tergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dijalankan dengan bantuan kredit tersebut.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai. Menurut Kasmir (2004:105), menyatakan bahwa:

Tujuan pemberian suatu kredit adalah:

a. Mencari keuntungan.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak penyedia kredit sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada penerima kredit.

b. Membantu usaha penerima kredit

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu penerima kredit yang memerlukan dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak penerima kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya pengucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Sedangkan fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang

kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan unsur masyarakat dan mengedepankan strategi dasar sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Visi PNPM Mandiri adalah tercapainya kemandirian masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi dan mengolah sumber daya yang ada di lingkungannya. Sedangkan misi dari PNPM Mandiri adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Sumber-sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.
- c. APBD Kabupaten/ kota sebagai dana pendamping.
- d. Kontribusi swasta (*Corporate Social Responsibility*).

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian.

Masyarakat dapat mempergunakan dana PNPM Mandiri untuk membangun sarana dan prasarana penunjang produktivitas, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirim ke pusat agar memudahkan penelurusan. Dalam hal ini UPK di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan

kemandirian, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan para pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam PNPM Mandiri dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
- d. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP).

2) Jenis kredit PNPM Mandiri

Menurut tujuan penggunaan kredit PNPM Mandiri merupakan kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kegiatan produksi. Sedangkan menurut jangka waktunya kredit PNPM Mandiri termasuk pada kredit jangka pendek minimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit berjangka pendek ini digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

3) Manfaat kredit PNPM Mandiri

Manfaat yang dapat diambil dari penyaluran dana atau modal usaha melalui kredit baik bagi debitur maupun bagi kreditur bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut diantaranya:

- a. Meningkatkan usaha, debitur dapat menggunakan kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, perluasan sumber daya alam, dan teknologi.
- b. Bagi pemerintah digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun secara khusus. Pertumbuhan tersebut dibentuk dari peningkatan kapasitas produksi.
- c. Meningkatkan lapangan usaha, lapangan kerja, menciptakan atau meningkatkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Indikator yang Digunakan	Teknik Analisis Data	Hasil
Sari Surya Maruf (Manajemen Unand, 2011)	Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri di Kecamatan Lubuk Begalung	Rasio Profitabilitas	Uji Wilcoxon Signed-Rank Test Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Bergulir PNPM Mandiri.	Rasio Profitabilitas UKM yang memperoleh bantuan PNPM mandiri memperlihatkan perubahan yang nyata.
Rahmatika (Manajemen Unand, 2011)	Analisis Efektifitas PNPM Mandiri pada UPK dan KSM SPP di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio keuangan Rasio Profitabilitas (NPM), (ROA), dan (ROE).	Uji Beda Sebelum dan Sesudah Menerima PNPM Mandiri	NPM: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menerima PNPM Mandiri ROA dan ROE: Terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah menerima PNPM Mandiri
Jabal Thariq Ibrahim dan Hanif Fitria Hapsari (Agribisnis Univ. Muhammadiyah)	Kinerja Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Penerima Dana Bergulir PNPM	1. Rasio Profitabilitas	Uji beda sebelum dan sesudah menerima PNPM Mandiri	Penerimaan dana bergulir tidak memberikan perbaikan terhadap kinerja keuangan usaha

diah, 2007)	Mandiri Modal Kerja di Kabupaten Kediri			
----------------	---	--	--	--

Perbedaan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah waktu dan tempat penelitian.

C. Kerangka Konseptual

Sejalan dengan topik diatas penulis akan menyoroti keunggulan yang dimiliki oleh UKM dari sisi keuangan UKM. Dengan adanya keunggulan perolehan tambahan modal usaha dalam bentuk kredit PNPM Mandiri tahun 2012 sebagai utang jangka pendek bagi UKM yang menerima diharapkan akan memberikan peningkatan profitabilitas terhadap usaha yang dijalankan dibanding waktu sebelumnya, dimana UKM hanya bergerak dengan keterbatasan modal sendiri, sehingga program kredit PNPM akan memberikan nilai positif terhadap kinerja keuangan UKM.

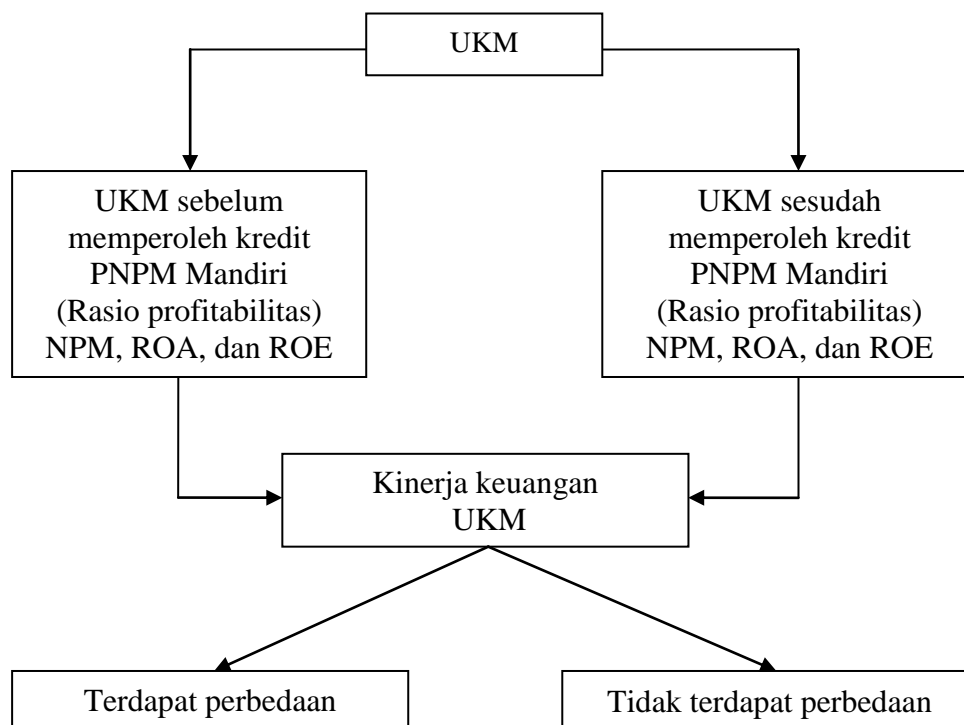
Sesuai dengan tujuan dan manfaat penilaian kinerja sebelumnya bahwa perlunya melakukan penilaian kinerja terhadap usaha yang dijalankan adalah untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Mc Commic dalam Manizu (2010:33-40) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja usaha adalah kebijakan pemerintah yang dalam penelitian ini adalah program PNPM

Mandiri. Sejalan dengan itu merujuk kepada tujuan pemberian kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2004:105) penilaian kinerja keuangan UKM ini akan memperlihatkan apakah tujuan pemberian kredit kepada masyarakat dari pemerintah telah tercapai.

Pengukuran kinerja keuangan UKM dilakukan dengan cara membandingkan atau membedakan antara kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas (NPM, ROA, dan ROE).

Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kepada kerangka konseptual di atas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ha: Terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kecamatan Canduang, kecamatan Baso dan kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diukur dari NPM.
2. Ha: Terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kecamatan Canduang, kecamatan Baso dan kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diukur dari ROA.
3. Ha: Terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kecamatan Canduang, kecamatan Baso dan kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang diukur dari ROE.

Secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$$

μ_1 : Rata-rata (populasi) kinerja keuangan UKM Ssebelum memperoleh kredit PNPM Mandiri.

μ_2 : Rata-rata (populasi) kinerja keuangan UKM sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV memfokuskan kepada kinerja keuangan UKM sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM mandiri di kabupaten Agam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penerimaan bersih (*NPM*) UKM penerima kredit PNPM mandiri memenuhi hipotesis awal yaitu terdapat perbedaan *NPM* sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri.
2. Berdasarkan tingkat efektivitas harta (*ROA*) UKM yang digunakan untuk kegiatan operasional UKM, hasil analisis data menunjukkan belum terdapat perbedaan *ROA* antara sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri.
3. Berdasarkan efektifitas penggunaan modal sendiri dan tingkat pengembalian modal yang dijalankan (*ROE*) UKM terdapat perbedaan kinerja keuangan UKM dari sisi *ROE* sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri.

B. Saran

Menindak lanjuti dari kesimpulan penelitian ini maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah meningkatkan jumlah dana PNPM Mandiri yang bisa direalisasikan kepada masyarakat agar terjadi peningkatan kinerja yang lebih tinggi daripada kinerja sebelumnya. Karena keterbatasan modal yang bisa di peroleh oleh masing-masing UKM tetap menjadi

hambatan untuk UKM meningkatkan kinerja keuangannya terutama meningkatkan laba usaha.

2. UPK PNPM mandiri disarankan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada UKM penerima kredit PNPM Mandiri. Melakukan pembinaan terutama terhadap memperbaiki manajemen UKM dalam mengendalikan dan memanfaatkan sejumlah aktiva untuk kegiatan operasional usaha agar lebih efektif dan lebih efisien. Melakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaporan keuangan usaha agar nantinya mampu secara mandiri membuat suatu laporan pertanggung jawaban usaha yang lebih baik dan lengkap agar usaha yang dijalankan memiliki jaminan untuk tetap berkembang lebih baik.
3. KSM PNPM Mandiri disarankan dengan dana dari PNPM Mandiri mampu mengembangkan usaha baik secara produksi dan target pasar produksi tidak hanya dalam wilayah tempat produksi namun bisa keluar daerah produksi. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja usaha secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2006). “Kinerja UMKM Masih Rendah”. *Harian Kompas*. (26 November 2006)
- (2012). “RAKYAT SUMBAR Rp 30,5 M Dana PNPM tak Terserap”. *Padang Ekspres*. (03 Desember 2012)
- Hafsah, Jafar Muhammad. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Infokop no 25
- Husnan, Suad. 1992. *Manajemen Keuangan Jangka Pendek*. Yogyakarta: bpfe
- Ibrahim, Jabal Tarik dan Hapsari, Hanif Fitria. 2009. *Kinerja Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Penerima Dana Bergulir Modal Kerja di Kabupaten Kediri*. *Jurnal keuangan dan perbankan*. Vol 13 januari hal 28-37
- Irham, Fahmi. 2012. *Menilai Kinerja Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana
- Kamus Basar Bahasa Indonesia. 1995. *Istilah Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Wali Press
- _____. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Wali Press
- Kuncoro, Mudrajat. 2005. *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga
- Leunupun. 2003. *Profitabilitas Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi*. Vol XI halaman 133-149)
- Munizu, Musran. 2010. *Pengaruh Faktor Eksternal dan Interna Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 12. No. 1 Maret hal 33-41).
- Muslich, Mohammad. 2003. *Manajemen Keuangan Modern (analisis, perencanaan, dan kebijakan)*. Jakarta: PT Bumi Aksara